

INDIKASI PERPECAHAN BANGSA DALAM KONDISI KETIDAKTERPENUHINYA PANGAN DI WILAYAH PAPUA

Maria Hera Agathea Manik¹ Ikomatussuniah²

mariahagathea@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis, karena memiliki peranan vital dalam memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, karena penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Jika kondisi ketahanan pangan terganggu, maka terjadi beberapa dampak negatif, seperti ketidak-stabilan ekonomi, gejala sosial dan politik, kondisi pangan yang kritis, peningkatan harga pangan, keterbatasan akses pangan, substitusi pangan dari pangan lokal ke bahan pangan impor, dan kebijaksanaan pangan nasional.

Kewajiban negara dalam memenuhi ketahanan pangan warga negaranya tersebut teratur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. UUD 1945 mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk “memberikan jaminan kepada warganegara agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin,” yang antara lain tercermin dalam “Pasal 28 A, ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke dua yang menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” “Pasal 34 UUD 1945 tentang menjamin hak warganegara atas perlindungan dari diskriminasi”. Jadi setiap daerah berhak menerima hak nya dengan layak tanpa adanya diskriminasi apapun.

Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 mengatur ketahanan pangan sebagai tanggung jawab negara, yang antara lain tercermin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" Dalam konteks hak atas pangan, negara diberi kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan gizi yang terjamin bagi masyarakatnya.

Kewajiban negara dalam memenuhi ketahanan pangan warga negaranya juga teratur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya" Hak atas pangan bergantung pada penghormatan akan kebebasan dan usaha ini tidaklah berdiri dengan sendirinya.

Ketahanan pangan dalam hukum Indonesia terdiri dari beberapa aspek yang mengatur aspek pangan sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa definisi dan aspek ketahanan pangan yang diterangkan dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan:

“Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).” Ketahanan

pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, bergizi, memiliki jenis yang beragam, terpenuhi untuk semua orang dan dapat dibeli dengan harga yang tidak mahal.

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam mengatur ketersediaan pangan yang cukup dan baik bagi masyarakat, sehingga dapat membantu mengurangi ketidak-stabilan ekonomi dan stabilitas nasional.

Kondisi terpenuhinya pangan merupakan suatu faktor yang dapat merusak suatu kesatuan bangsa apabila tidak terimplementasikan dengan baik. Negara sebagai organisasi yang menaungi warga negara memiliki kunci penting untuk memenuhi kondisi tersebut, upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sila kelima Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Papua sendiri merupakan daerah yang berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Kaya akan sumber daya alam antara lain Minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, perak, batu bara dan lain sebagainya. Namun Papua memiliki kondisi kurang baik untuk menghasilkan sumber makanan karena kondisi tanah di Papua tidak cocok untuk pertanian, yang mana Papua sangat bergantung dengan beras, Tanah di Papua memiliki kadar unsur hara yang rendah, Wilayah Papua memiliki kawasan yang berbatu serta Iklim di Papua terdiri dari iklim ekuatorial, subtropis dan tropis mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pertanian.



Sumber foto: <https://achmadnurhidayat.id/2023/08/kelaparan-di-papua-panggilan-kritis-untuk-merdeka-sejati/>

Selain itu Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kekurangan infrastruktur dan teknologi membuat masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat mengakses sumber daya tersebut serta tidak dapat mengembangkan hasil panennya sebagai nilai tukar uang untuk membeli bahan pokok lain. Harga kebutuhan pokok yang sangat mahal membuat warga Papua tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap rumah tangganya. Kondisi pangan di Papua juga tergantung pada akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, yang terlihat dari persentase desa yang memiliki akses jalan tersebut. Beberapa daerah memiliki persentase desa dengan akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat yang rendah, yang menyebabkan masalah dalam pemasaran dan distribusi pangan lokal.

Kekurangan pangan di Papua menyebabkan kelaparan yang berujung kematian, stunting, dan kemiskinan ekstrem, masalah ini telah terjadi secara berulang dalam waktu yang lama. Banyak warga Papua yang mati kelaparan serta anak - anak yang mengalami gizi buruk. Seperti tragedi yang terjadi baru baru ini di daerah Distrik Amuma, Yahukimo Papua pada tanggal 21 Oktober hingga 1 November 2023 terdapat 23 orang yang terdiri dari balita, anak-anak, hingga lansia meninggal dunia akibat kelaparan. Karena kondisi iklim yang menyebabkan minimnya penghasilan pangan.

Di Papua, dimana anak-anak dan wanita banyak yang meninggal akibat kelaparan dan kurang gizi, ketahanan pangan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua termasuk masyarakat di wilayah terpencil. Kelaparan di Papua merupakan suatu ironi yang mana terjadi di negara agraris seperti Indonesia, yang kaya akan sumber tanaman pangan dan perkebunan yang beragam namun masih ada daerah yang sekarat karena kurangnya kepedulian pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat harus melakukan langkah masif dan komprehensif untuk mengurangi kelaparan di Papua, termasuk membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, memperkuat sistem pengawasan ketahanan pangan, dan membantu masyarakat dalam memilih makanan yang populer dan nutrisi

Sistem pertanian di Papua sangat rentan dan tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak memiliki simpanan pangan ketika terjadi kejadian luar biasa seperti cuaca ekstrem yang mempengaruhi pertanian.

Kondisi kesehatan masyarakat Papua yang rapuh akibat berada dalam situasi krisis yang sangat lama membuat kelaparan yang berujung kematian semakin banyak korban. Oleh sebab itu untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mengakhiri bencana kelaparan di wilayah Papua, perlu ada langkah masif dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.

Lalu dimana letak indikasi perpecahan tersebut?

Indikasi perpecahan bangsa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti disintegrasi, globalisasi, kesenjangan sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan suku bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah-belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. memudarnya semangat nasionalisme masyarakat, munculnya sikap hedonis dan persaingan yang menyebabkan kecenderungan individualis, kesenjangan sosial masyarakat yang berakibat pada konflik, dan generasi muda semakin apatis terhadap kehidupan Masyarakat.

Dengan permasalahan serta tragedi yang terus berulang menimbulkan rasa ketidakadilan yang sangat besar yang di alami para warga di wilayah Papua, merasa tidakpuas akan pemerintah yang dirasa tidak cukup baik untuk mengayomi daerah tersebut sebagai salah satu wilayah yang masuk bagian Indonesia. Warga Papua mengatakan bahwa pemerintah tidak serius mengatasi masalah di wilayah tersebut dan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Papua. Selain karna masalah dari kebutuhan pangan yang tidak larut, muncul juga pemicu negative yang telah dilihat dan dirasakan langsung oleh warga Papua, Papua masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah serta warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Papua. Kepedulian untuk Papua tidak sebanding dengan apa yang di berikan untuk wilayah di daerah lain bahkan kepada Negara lain pun dirasa lebih peduli, dibanding dengan kerisis yang terjadi di Papua yang merupakan saudaranya di satu negara Indonesia.

Pada dasarnya, indikasi perpecahan bangsa dalam kondisi ketidakterpenuhan pangan di wilayah Papua terlihat dari berbagai perspektif, dari kelaparan berulang yang menyebabkan kematian dan kesulitan pangan, hingga keadaan kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang tidak memadai. Pemerintah dan pihak lainnya perlu melakukan tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah pangan di wilayah Papua, yang tergantung pada pengembangan sistem pemasaran, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan kondisi alam, aksesibilitas, dan budaya di wilayah tersebut.

Warga Papua yang telah merasakan berbagai masalah krisis dan merasa pemerintah hanya mencari untung, telah menyuarakan usaha kemerdekaannya sendiri dari Indonesia. hak asasi manusia serta perlakuan yang tidak adil dan setara terhadap warga negara di Papua. Papua mengklaim bahwa sumber daya alam di wilayah tersebut lebih banyak dikelola oleh orang yang bukan penduduk asli dan bahkan orang asing, yang menjadi salah satu alasan Papua ingin merdeka dan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Papua sudah merasa lelah akan diskriminasi pemerintah pusat yang juga telah mengeksploitasi terus menerus hasil alam Papua.

Saat ini Papua dan Indonesia telah mengalami situasi yang panas karna telah dimulainya Usaha untuk pemisahan wilayah Papua dari kesatuan Indonesia. Saat ini pun telah muncul beberapa konspirasi yang ada dalam Masyarakat, bahwa adanya campur tangan negara lain untuk memperkeruh keadaan agar Papua dapat benar terpisah dari Indonesia, dan agar SDA Papua dapat dikuasai sepenuhnya oleh negara lain tersebut. Namun apabila benar adanya hal tersebut pemerintah Indonesia tetap telah menunjukkan kegagalannya dalam mengembani Papua yang mana warga Papua lebih memilih mengikuti arahan negara lain karna merasa tidak adanya keuntungan dan harapan baik dari negaranya sendiri yakni Indonesia. Pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan dengan mengarahkan TNI dan POLRI di Papua namun masih belum ditemukannya titik temu untuk penyelesaian masalah tersebut.

Apakah dampak dari perpecahan bangsa?

Perpecahan bangsa dapat menyebabkan perubahan alam, seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas, dan penggunaan alat berat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti kehilangan hutan, pencemaran air, dan pencemaran udara. Yang mana apabila Papua resmi menjadi bukan bagian Indonesia, Indonesia sudah tidak memiliki hak untuk mengatur dan mengelolah wilayah tersebut. Serta ekonomi Indonesia dapat

terganggu yakni mengalami penurunan penghasilan negara dikarenakan kurangnya penghasilan hasil bumi yang sebelumnya banyak dihasilkan di wilayah Papua.

Perpecahan bangsa juga dapat menyebabkan perubahan macam budaya. Indonesia sendiri kaya akan budaya di setiap daerahnya masing-masing dan Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki budaya yang sangat memukau dan sangat khas dengan faktor letak geografisnya. Kehilangan suatu budaya merupakan hal yang sangat disayangkan.

Perpecahan bangsa juga dapat menciptakan munculnya diskriminasi yang lebih parah kepada keturunan Papua yang ada di Indonesia apabila Papua resmi berpisah dari Indonesia, karena dianggap sudah tidak berhak di Indonesia. Orang yang memang satu negara saja sudah sering di diskriminasi karena perbedaan baik warna kulit, etnis dan agama, apalagi sudah beda negara dan tidak memiliki kesamaan.

Apa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut?

Pemerintah dan pihak lainnya dapat membangun sistem pemasaran yang efektif dan terintegrasi, yang dapat membantu mengatasi kesulitan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan. Melakukan perbaikan kondisi alam, seperti mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air, dan mengurangi kehilangan hutan.

Pemerintah dan pihak lainnya dapat melakukan perbaikan aksesibilitas, seperti membangun jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, membangun lembaga pemasaran dan transportasi yang terintegrasi, dan membangun fasilitas pengolahan pangan.

Pemerintah setempat juga dapat memperkuat distribusi pertanian di wilayah terpencil. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan jalan, pengiriman bahan baku pangan ke pasar, dan pengembangan fasilitas pengolahan pangan yang dapat membantu mengurangi kesulitan distribusi. pengaturan hukum yang membatasi pengambilalihan lahan tanpa izin, serta memperkuat hukum yang memproteksi hak atas lahan masyarakat.

Selain itu, pemerintah setempat juga dapat membangun program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemasaran, yang dapat membantu mengurangi kesulitan pangan dan kesenjangan sosial.

Perpecahan bangsa merupakan masalah yang serius dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk mencegah perpecahan bangsa, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

Dengan memfasilitasi Dialog Antar Kelompok agar dapat saling memahami dan mengerti satu sama lain secara mendalam. Mengatur Regulasi Media untuk lebih bertanggung jawab akan apa yang ditulis, dengan etika yang layak sebagai seorang jurnalis yang bermartabat serta adil dalam memberitakan berbagai kelompok dalam Masyarakat.

Memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami konflik politik dan menghindari perpecahan yang mungkin terjadi

Tak Mudah Terpapar Berita Hoax kemudahan berteknologi tidak menjadi alasan untuk bodoh dalam bersosial media, waspada dan berusaha untuk mengecek kebenaran suatu berita serta tidak gampang menyebarkan suatu berita tanpa tau faktanya.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada hukum positif, seperti Undang-Undang Pancasila yang mengacu pada persatuan nasional dan integritas nasional

Dan untuk memperbaiki kondisi diskriminasi yang memang telah terjadi Kepolisian harus melakukan proses hukum secara tegas dan transparan serta berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap ras tertentu. Menanamkan sejak dini untuk menerima perbedaan dan persatuan Indonesia. Dengan mengimplementasikan Bhineka Tunggal Ika secara nyata tidak hanya ucapan belaka.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, masyarakat dapat membangun perpaduan dan mencegah perpecahan bangsa.